

ABSTRAK

Miswari (E1011171064): IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2022.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalahi aturan mengenai jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tumpukan sampah di luar tempat pembuangan sementara (TPS) dan masih ada masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan. Peraturan mengenai jadwal pembuangan sampah ini diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah. Berdasarkan teori George C. Edward III terdapat empat (4) Faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan kurangnya ketegasan dari para implementor kebijakan sehingga tidak ada rasa takut bagi masyarakat untuk membuang sampah diluar jadwal yang telah ditetapkan dan juga kurangnya jumlah petugas penjaga TPS yang ada dilapangan sehingga masih sering terjadi kekosongan penjaga yang membuat masyarakat tidak takut membuang sampah diluar jadwal

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Jadwal Pembuangan Sampah.

ABSTRACT

Miswari (E1011171064): IMPLEMENTATION OF PONTIANAK MAYOR'S REGULATION NUMBER 48 OF 2020 ON WASTE DISPOSAL SCHEDULE AT SOUTH PONTIANAK DISTRICT, PONTIANAKCITY.

Undergraduate thesis. Public Administration Study Program in Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2022.

The problem in this study is the low level of public awareness in responding to the rules regarding the waste disposal schedule. This condition was proofed by the existence of piles of garbage outside the temporary disposal sites (TPS). There were also people who dispose the waste outside the predetermined schedule. This regulation regarding the waste disposal schedule is regulated in the Pontianak Mayor Regulation Number 48 of 2020 on the Waste Disposal Schedule. Based on the theory of George C. Edward III, there are four (4) factors influencing the implementation process, such as communication, resources, disposition/ attitude of implementers, and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative researchmethod.

The results of this research, taken directly from the field, showed that there was a lack of firmness from policy implementers so that there was no fear for the community to dispose the waste outside the predetermined schedule and also the lack of a number of TPS guard officers in the field so that there were still frequent vacancies of guards causing people not afraid to put the garbage outside the schedule. Suggestions from researcher, especially to the Pontianak City Environmental Service, are the need for additional TPS guard officers so that the rules can be implemented optimally, and the use of media as a tool of communication to the community in socializing the process so that people can understand the existed rules.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Disposal Schedule.



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK”. Peneliti memilih judul ini karena masih adanya pelanggaran terhadap peraturan jadwal pembuangan sampah khususnya di kecamatan Pontianak Tenggara, hal ini dibuktikan dengan adanya tumpukan sampah diluar jadwal pembuangan sampah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya, karena dilapangan masih ditemukan sampah liar, yaitu tumpukan sampah yang terdapat diluar tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini diperlukan ketegasan dari para implementor kebijakan dalam melakukan pengawasan di TPS khususnya di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara yang mana dalam hal ini menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah Khususnya di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah model implementasi George C. Edward III.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian yang sebenarnya berdasarkan fakta dan data di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, memilih kecocokan data, menyusun pertanyaan-pertanyaan, dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara sudah berjalan namun belum optimal. Komunikasi antar Implementor dalam proses Implementasi Peraturan Walikota Pontianak tentang Jadwal Pembuangan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara telah terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat misskomunikasi dikalangan petugas lapangan, yaitu penjaga TPS yang membolehkan masyarakat membuang sampah mulai pukul 15:00.

Kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan Perwa terkait penertiban pembuangan sampah masih kurang. Dengan luasnya wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dan banyaknya jumlah penduduk sebagai penghasil sampah, terutama sampah rumah tangga membuat petugas penjaga TPS kewalahan dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjaga TPS dan mengawasi lokasi-lokasi TPS liar, sehingga masih sering kebobolan dan masih ada saja msyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya.

Disposisi atau sikap yang diambil implementor kebijakan terhadap masyarakat sudah bisa dilihat dari pemberian peringatan penyitaan KTP sampai dengan membayar biaya paksaan. Dengan cara ini Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kota Pontianak

sebagai Implementor Kebijakan bermaksud untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih membuang sampah di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan SOP dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, setiap individu atau organisasi yang membuang sampah di TPS bukan pada jadwalnya maka akan dilakukan penyitaan kartu identitas baik berupa KTP atau kartu identitas lain dan yang bertugas melakukan hal tersebut adalah penjaga TPS, namun pada kenyataannya di lapangan penjaga TPS hanya memberikan peringatan berupa teguran pada para pelanggar. Selanjutnya tugas dari Satpol-PP melakukan penindakan dengan menarik biaya paksaan bagi siapa saja yang tertangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya.